

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Banyak penelitian yang berspekulasi tiga gelombang tersebut penyebab utama dari krisis finansial adalah globalisasi, liberalisasi, finansialisasi.<sup>1</sup> Menurut Reinhart and Rogoff (2009) krisis dibagi menjadi empat tipe yaitu krisis yang diklasifikasikan menggunakan definisi kuantitatif yang ketat dan krisis yang bergantung pada besarnya kualitatif dan penilaian analisis yaitu *currency crises*, *sudden stop crises*, *debt crises* dan *banking crises*. Suatu krisis finansial yang terjadi dapat merupakan akumulasi dari beberapa tipe krisis.<sup>2</sup> Krisis Finansial yang dialami Yunani dapat dikategorikan pada tipe *debt crises* yang mengakibatkan *currency crises* hingga *bank crises*. Krisis finansial Yunani yang diawali dengan menumpuknya utang, mengakibatkan guncangan pada nilai Euro.

Keterkaitan antara finansial Yunani dengan Euro, tidak lain Euro adalah mata uang yang digunakan dalam kegiatan perekonomian Yunani. Euro merupakan mata uang tunggal dalam perdagangan kawasan zona Euro.<sup>3</sup> Sistem finansial yang terintegrasi diantara negara anggota zona Euro dapat terpengaruhi oleh krisis finansial Yunani. Pada tahun 1998 Yunani mencatat inflasi yang tinggi sebesar 5,4%, rasio defisit 6% dari total PDB dan rasio utang sebesar 98,7 %, dari total

---

<sup>1</sup>Prasetyantoko, A.,2009, *Krisis finansial dalam perangkap ekonomi neoliberal*,Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal. 11

<sup>2</sup> Claessens,S. dan Kose, M. A.,2013,*Financial Crises: Explanations, Types, and Implication.*,IMF working paper

<sup>3</sup> Zona Euro adalah negara-negara yang menggunakan mata uang Euro sebagai mata uang negaranya dan tergabung dalam Sistem Moneter Eropa (EMS). Dengan ECB sebagai bank sentral yang mempunyai kewenangan kebijakan moneter. Negara-negara ini juga merupakan anggota dari Uni Eropa dengan anggota 28 dan negara anggota yang tergabung dalam zona Euro sebanyak 19 negara hingga 2013.

PDB tidak ada yang masuk dalam kriteria ekonomi perjanjian Maastricht.<sup>4</sup> Menurut Martin dan Waller adanya alasan *euforia* menciptakan mata uang tunggal untuk bersaing dengan dolar AS, akhirnya Yunani memasuki zona Euro dan yang menjadikan obligasi Yunani sama dengan negara anggota zona Euro lainnya di mata investor.<sup>5</sup>

Pada tahun 2004, pemerintah Yunani mengalami defisit sebesar 7,5 % dari total PDB dikarenakan besarnya pembiayaan, dengan menggunakan Euro, sebagai tuan rumah olimpiade.<sup>6</sup> Belum stabilnya tingkat utang Yunani, krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang menjadikan ekonomi negara-negara maju mulai melambat karena keringnya investasi yang berpindah ke negara berkembang. Hal ini mengakibatkan perekonomian di negara-negara kawasan Eropa ikut terkena dampaknya dan pemerintah harus banyak berperan untuk mengatasi hal tersebut.<sup>7</sup> Pada akhir tahun 2009, Deputy Menteri Keuangan Yunani Philippos Sahinidis akhirnya menyatakan bahwa utang negara telah mencapai 127,1% dari jumlah PDB-nya 300 miliar Euro. Ditandai dengan menggelembungnya utang-utang pemerintah yang sudah jatuh tempo dan bangkrutnya banyak bank-bank swasta maupun milik negara.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Kriteria fiskal yang ditentukan Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht yang menghasilkan ketentuan Stability Growth Pact pada tahun 2003. Dengan batasan defisit setiap negara dalam zona Euro sebesar 3% dan tingkat utang sebesar 60% dari total PDB.

<sup>5</sup> Martin dan Waller, 2012, *A Brief Explanation of How the Greek Sovereign Debt Crisis Came to Be*, [online] diakses tanggal 10 oktober 2013, tersedia di: <http://www.reed.edu/economics/parker/f12/341/Sim/rpts/Greece.pdf>

<sup>6</sup> Bastasin, C., 2012, *Saving Europe: How National Politics Nearly Destroy the Euro*, Brookings Institutions Press., Washington D.C. hal. 12, [book online] diakses tanggal 26 Oktober 2014, tersedia dalam: [www.brookings.edu](http://www.brookings.edu)

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Philip Pangalos, 2009, *Greece vows to 'clean up' its debt mountain*, The Times, [online] diakses 8 oktober 2014, tersedia di: <http://www.thetimes.co.uk/tto/business/economics/article2151423.ece>

Dalam laporan keuangan negara yang semula defisit hanya 9,8% naik drastis empat kali lipat menjadi 15,4 %. Badan pengamat perekonomian Standart & Poor's menurunkan peringkat utang Yunani dari A- menjadi BBB+.<sup>9</sup> Krisis ini mulai membuat Yunani mengalami kesulitan dana dalam menjalankan proyek pembangunan negara dan kesulitan dalam pendanaan perbankannya. Dari tabel 1.1 terlihat bahwa defisit Yunani sudah mencapai lebih dari 15% dari total PDB tahun 2009. Tingkat utang yang dimiliki Yunani merupakan akumulasi sejak bergabungnya Yunani menjadi anggota Uni Eropa yang tidak berkurang.

Tabel 1.1. Defisit Anggaran Pemerintah Beberapa Negara-Negara Zona Euro Tahun 2004-2010 (% PDB)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jerman	-3,8	-3,3	-1,6	0,3	0,1	-3,0	-3,3
Irlandia	1,4	1,6	2,9	0,1	-7,3	-14,3	-32,4
Yunani	-7,5	-5,2	-5,7	-6,4	-9,8	-15,4	-10,5
Spanyol	-0,3	1,0	2,0	1,9	-4,2	-11,1	-9,2
Perancis	-3,6	-2,9	-2,3	-2,7	-3,3	-7,5	-7,0
Itali	-3,5	-4,3	-3,4	-1,5	-2,7	-5,4	-4,6
Portugal	-3,4	-5,9	-4,1	-3,1	-3,5	-10,1	-9,1

Sumber: Eurostat

Pada tahun 2001 mata uang Yunani yang semula 'drakhma' berubah menjadi Euro yang diikuti dengan berubahnya kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan syarat-syarat fiskal yang harus dipenuhi. Perdana Menteri Yunani yang pada saat itu dijabat oleh George Papandreou menyatakan bahwa utang Yunani masih dapat diatasi dan menjamin bahwa Yunani tidak jatuh bangkrut. Hal ini mengharuskan Yunani mengatasi krisis domestik ini sendiri tanpa bantuan Uni

<sup>9</sup>Peringkat rating yang diberikan sesuai dengan standart dari institusi tersebut. Dengan asumsi rating dengan nilai A berarti sangat kuat, nilai B berarti stabil dan nilai C berarti rapuh. Martin dan Waller, 2012, *A Brief Explanation of How the Greek Sovereign Debt Crisis Came to Be*, [online] diakses tanggal 10 oktober 2013, tersedia di: <http://www.reed.edu/economics/parker/f12/341/Sim/rpts/Greece.pdf>

Eropa.<sup>10</sup> Pada awal Maret 2010 Perdana Menteri segera menjalankan program efisiensi pertamanya untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2010. Di bulan April, Yunani hanya mengumpulkan dana sebesar 5 miliar Euro dari kebijakan tersebut dan akhirnya meminta bantuan dana pada Uni Eropa sebesar 45 miliar Euro menghindari gagal bayar (*default*) dan membiayai defisit anggarannya.<sup>11</sup>

Timbulnya banyak kekhawatiran muncul bahwa krisis ini semakin menenggelamkan Euro, karena menurut data yang terbaru defisit pemerintah Yunani telah mencapai 13,6% bukan lagi 12,7% dari total PDB-nya, maka Uni Eropa menawarkan bantuan dengan Yunani untuk menyetujui rancangan dana *bailout* sebesar 110 miliar Euro. Pada awal Mei 2010 kebijakan *bailout* pertama Yunani dengan nilai mencapai 110 miliar Euro disepakati dengan kontribusi Uni Eropa sebesar 80 miliar Euro dan sisanya 30 miliar Euro dari Organisasi Moneter Internasional (IMF). Bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa dan IMF berupa pinjaman dengan bunga sebesar 5% melalui program Stand by Arrangement (SBA) yang harus mulai dibayar pada tahun 2013. Syarat yang diajukan Uni Eropa dan IMF dalam *bailout* yaitu adanya disiplin fiskal (*austerity*) dan perubahan struktural pada Yunani. Syarat tersebut disepakati antara Uni Eropa, IMF dan Yunani dalam Economic Adjustment Programme (EAP).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>BBC,2009,*Greece insists it will not default on huge debts*,BBC NEWS,[online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia di: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8407605.stm>

<sup>11</sup> BBC,2012,*Timeline: The unfolding Eurozone crisis* ,BBC NEWS,[online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia di: <http://www.bbc.com/news/business-13856580>

<sup>12</sup> IMF,2013,*Greece:Ex Post Evaluation Of Exceptional Access Under The 2010 Stand-By Arrangement*, [online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia dalam:<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>

Di bulan selanjutnya badan analisis ekonomi Strandart & Poor's kembali menurunkan status obligasi Yunani menjadi CCC atau utang sampah karena hasil koreksi pasar angka utang sangat besar dan ketidakmampuan negara untuk membayar utang tersebut tepat waktu.<sup>13</sup> Maka nilai obligasi Yunani menjadi semakin jatuh karena investor banyak yang menarik dananya dari Yunani.<sup>14</sup> Setelah selama satu tahun perekonomian tidak juga membaik malah semakin memburuk ditambah dengan maraknya demonstrasi massal, meningkatnya kekerasan dan meledaknya pengangguran. Menteri Keuangan Yunani Evangelos Venizelos berpendapat bahwa negaranya telah dipermalukan dan mendapatkan reputasi buruk oleh dunia Internasional akibat dari ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengatasi krisis di Yunani.<sup>15</sup>

Pada pertemuan G20 di Paris bulan Oktober 2011, kekhawatiran Uni Eropa timbul kembali pada kemampuan Yunani untuk membayar utang. Hal ini membuat Uni Eropa kembali memberikan pinjaman pada Yunani, tetapi perjanjian ini juga mendapat penentangan dari Inggris, yang menolak beberapa syarat yang tertulis dalam perjanjian tersebut.<sup>16</sup> Uni Eropa juga melakukan pemotongan nilai utang Yunani sebesar 50% dan penambahan kapasitas dana *bailout* sebesar 130 miliar Euro.<sup>17</sup> Perdana Menteri George Papandreou menolak

<sup>13</sup>Obligasi adalah surat yang berisi janji suatu perusahaan/pemerintah untuk membayar pemegangnya dengan pembayaran bunga secara periodik hingga batas waktu jatuh tempo pinjaman dan pembayaran jumlah uang yang telah ditentukan

<sup>14</sup>Martin dan Waller, 2012, *A Brief Explanation of How the Greek Sovereign Debt Crisis Came to Be*, [online], diakses tanggal 10 oktober 2013, tersedia di: <http://www.reed.edu/economics/parker/f12/341/Sim/rpts/Greece.pdf>

<sup>15</sup> BBC, 2011, *Greece says debt talks to avert default 'productive'*, BBC NEWS, [online] diakses tanggal 1 November 2013 tersedia di: <http://www.bbc.co.uk/news/business-14969034>

<sup>16</sup>BBC, 2011, *EU summit 'will be decisive' on Eurozone crisis*, BBC NEWS, [online] diakses tanggal 1 November 2013 tersedia di: <http://www.bbc.com/news/business-15319026>

<sup>17</sup> Tempo, 2012, *Uni Eropa Setujui Bailout Kedua Yunani*, Tempo Bisnis, [online] diakses tanggal 1 November 2013 tersedia di: [www.tempo.co/read/news/2012/02/21/090385346/Uni-Eropa-Setujui-Bailout-Kedua-Yunani](http://www.tempo.co/read/news/2012/02/21/090385346/Uni-Eropa-Setujui-Bailout-Kedua-Yunani)

perjanjian tersebut dan ingin menggelar referendum kepada warga Yunani untuk mempertanyakan apakah Yunani tetap dalam zona Euro atau keluar.<sup>18</sup> Hal ini mendapatkan reaksi keras dari parlemen Yunani dan Uni Eropa yang berupaya untuk membantu Yunani.

Menteri Keuangan Evangelos Venizelos meredam kecemasan Uni Eropa dengan pernyataannya bahwa keanggotaan Yunani terlalu berharga untuk ditaruhkan di meja voting dan mosi tersebut akhirnya dibatalkan, tetapi hal ini membuat Perdana Menteri George Papandreou dipaksa turun oleh partai oposisi dan bahkan oleh partainya sendiri. Pada tanggal 9 November 2011, Perdana Menteri George Papandreou akhirnya resmi mengundurkan diri dari pemerintahan dan meminta parlemen agar segera membentuk pemerintahan baru. Lucas Papademos mantan kepala bank Yunani mengambil kepemimpinan kabinet sebagai utusan dari partai koalisi New Democracy/Pasok untuk mengisi tampuk pemerintahan yang telah ditinggalkan oleh George Papandreou.<sup>19</sup> Kepemimpinan sementara pemerintahan Yunani dipegang oleh Perdana Menteri Papademos yang akhirnya melakukan persetujuan atas kebijakan *bailout* yang kedua pada tanggal 14 Maret 2012. Perdana Menteri Jean Claude Juncker dari Luxembourg yang menduduki kepemimpinan dalam Komisi Uni Eropa mengatakan bahwa Yunani

---

<sup>18</sup> BBC,2012,*Timeline: The unfolding Eurozone crisis* ,BBC NEWS,[online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia di: <http://www.bbc.com/news/business-13856580>

<sup>19</sup>Telegraph staff and agencies,2011,*George Papandreou resigns as Greece's prime minister*,The Telegraph,[online] diakses tanggal 5 November 2013, tersedia di:<http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8879647/George-Papandreou-resigns-as-Greeces-prime-minister.html>

telah setuju menerima *bailout* yang kedua dari Uni Eropa dan IMF dan berkomitmen untuk mengatasi ini.<sup>20</sup>

Dengan disetujuinya *bailout* yang kedua maka gugurlah kesepakatan *bailout* yang pertama. Kekhawatiran Uni Eropa atas ketidakmampuan Yunani memenuhi target yang diberikan Uni Eropa dan IMF menjadikan kesepakatan *bailout* pertama Yunani telah gagal. Pada akhir 2013 IMF menyatakan bahwa kebijakan *bailout* pertama merupakan kesalahan dan kegagalan dalam mengatasi krisis yang dialami Yunani pada saat itu. Hal ini menimbulkan efek domestik yang sangat signifikan dan kerugian pada masyarakat Yunani sendiri.

Christine Lagarde mengatakan: “The Fund approved an exceptionally large loan to Greece under a stand-by agreement in May 2010 despite having considerable misgivings about Greece's debt sustainability. The decision required the Fund to depart from its established rules on exceptional access. However, Greece came late to the Fund and the time available to negotiate the programme was short.”<sup>21</sup>

Menurut Holsti, sesuai dengan fungsinya *bailout* yang merupakan bantuan pinjaman dana yang diberikan untuk mengatasi krisis finansial jika negara meminta bantuan pada negara lain atau institusi yang berwenang seperti IMF.<sup>22</sup> Sesuai dengan ketentuannya *bailout* pertama Yunani yang diberikan oleh IMF dan Uni Eropa agar Yunani dapat memperbaiki perekonomiannya. Namun demikian, seiring dengan implementasinya *bailout* pertama Yunani tidak dapat mengatasi krisis Yunani dan tidak dapat memperbaiki stabilitas finansial Yunani. Hal ini mengakibatkan keadaan domestik Yunani menjadi kacau dikarenakan finansial

<sup>20</sup> Castle, S.,2012,*With Details Settled, a 2nd Greek Bailout Is Formally Approved*,The New York Times,[online] diakses 13 oktober 2013, tersedia dalam: [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com)

<sup>21</sup> Elliott, L.,Inman, P.& Smith H.,2013,*IMF admits: we failed to realise the damage austerity would do to Greece*,The Guardian News [online] diakses 15 oktober 2013, tersedia dalam:<http://www.theguardian.com>

<sup>22</sup> Perwita, A.A.B., & Yani, Y.M.,2005,*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rodakarya, Bandung, hal. 83-84

Yunani belum pulih dari krisis dan dampak program disiplin fiskal yang menambah kesengsaraan masyarakat Yunani.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa implementasi kebijakan *bailout* pertama oleh Uni Eropa dan IMF gagal dalam mengatasi krisis finansial Yunani tahun 2010-2012?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kegagalan Uni Eropa dan IMF dalam menangani krisis finansial anggotanya ditengah goncangan krisis finansial yang terjadi pada Yunani dan tidak efektifnya *bailout* pertama untuk memperbaiki perekonomian Yunani. Nilai kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, penelitian diharapkan mampu menjadi sebuah kajian ilmiah untuk memahami salah satu bentuk integrasi dalam regionalisme yaitu Uni Eropa. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan sederhana bagi semua pihak tentang hal yang menyebabkan pentingnya suatu stabilitas dalam integrasi ekonomi yang dilakukan Uni Eropa. Melalui kebijakan *bailout* yang pertama oleh Uni Eropa dan IMF tidak menjadikan krisis finansial Yunani terselesaikan melainkan mendorong Yunani kedalam resesi ekonomi yang semakin dalam.

#### 1.4. Kerangka Pemikiran

Krisis finansial tidak hanya mendatangkan penderitaan domestik tetapi juga mempengaruhi sistem finansial internasional karena sistem finansial negara berada dalam finansial global yang terintegrasi. Dalam hal ini, Edison menjelaskan bahwa adanya finansial internasional yang terintegrasi (IFI) mengacu pada sejauh mana suatu perekonomian tidak membatasi transaksi lintas batas.<sup>23</sup> Oleh karena itu, krisis finansial yang muncul dari pasar atau negara yang saling berkorelasi dapat meningkatkan spekulasi *contagion*.<sup>24</sup> Ketika negara mengalami gejala terjadinya gagal bayar, meskipun telah melakukan kebijakan preventif, satu-satunya jalan yang diambil negara adalah meminta bantuan dana pada lembaga finansial domestik maupun internasional sebagai kreditur pilihan terakhir (*lender of last resort*). Hal ini disebabkan tugas untuk mengatur kebijakan moneter berada ditangan bank sentral atau institusi finansial internasional yang dapat berperan menjadi bank sentral seperti IMF atau World Bank.<sup>25</sup>

Dalam mencari solusi yang tepat untuk merespon krisis finansial, Roubini membaginya menjadi empat pendekatan yang menginterpretasikan perubahan kebijakan untuk menanggulangi krisis. Pendekatan pertama berdasarkan pada ketidakmampuan negara untuk membayar kewajibannya dan pengeluaran yang mengakibatkan guncangan ekonomi. Alternatif yang seharusnya diambil negara yaitu mendapatkan pinjaman dengan bunga yang diharapkan rendah tetapi

<sup>23</sup>Edison, H.J., Levine. R., Ricci, L., & Sløk, T. 2002. *International financial integration and economic growth*, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 9164. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnalekonomi/Documents/11ec79729230486aa426daa84fbca561ArisyiFRazTamarindPKIndraDeaKArtikasihSyalindraCit.pdf>

<sup>24</sup> *Contagion* secara luas didefinisikan sebagai *transmission of shocks* (krisis) antar pasar (negara). *contagion* merupakan suatu fenomena ketika krisis finansial yang terjadi pada suatu negara memicu krisis finansial pada negara lainnya disebut juga efek menular

<sup>25</sup> Roubini, N. & Setser, B., 2004, *Bailouts Or Bail-ins: Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C hal. 30

membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Proses restrukturisasi utang negara diturunkan ke level konsisten berdasarkan kemampuan negara yang sebenarnya untuk membayar cepat dan tepat waktu. Perubahan kebijakan dalam merestrukturisasi utang dengan biaya rendah adalah cara yang tepat bagi negara debitur dan krediturnya.<sup>26</sup>

Pendekatan yang kedua menekankan pada sulitnya merubah kontrak pada utang pemerintah yang mengakibatkan masalah ketidakmauan negara untuk membayar. Terkadang negara yang mampu menolak membayar dan dengan sengaja dibiarkan hingga mengalami gagal bayar, karena utang negara memperoleh keistimewaan yaitu berupa perlindungan hukum. Alternatif yang tepat pada pendekatan ini yaitu dengan meningkatkan biaya restrukturisasi utang yang dapat memaksa negara untuk melunasi utangnya. Pendekatan ketiga mengajukan alternatif solusi pada resiko pelarian utang negara, dimana negara cenderung menggunakan utang jangka pendek untuk membiayai pembangunan jangka panjang, yang memicu kepanikan investor dan melakukan penarikan modal karena investor beranggapan negara tidak bisa melunasi utang. Solusi yang ditawarkan menekankan pada pencegahan larinya modal dengan adanya lembaga *lender of last resort* yang dapat memberikan dana cadangan yang cukup untuk menghentikan larinya modal dan menghindari krisis.<sup>27</sup>

Dan perpektif yang terakhir menjelaskan pinjaman dalam bentuk asuransi yang bisa mendorong kebijakan yang rapuh pada negara debitur dan juga memunculkan pinjaman yang rawan dari kreditur di negara-negara industri. Hal

---

<sup>26</sup> Roubini, N. & Setser, B.,2004,*Bailouts Or Bail-ins:Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C hal. 76

<sup>27</sup> Roubini, N. & Setser, B.,2004,*Bailouts Or Bail-ins:Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C hal.77

tersebut akan menyebabkan pelarian utang juga berimbas pada pelarian dana bank yang dilakukan oleh para depositor nakal. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan meningkatkan biaya penanganan krisis agar tidak terjerumus kedalam masalah krisis yang membuat kreditur berspekulasi.<sup>28</sup> Kepanikan yang dirasakan kreditur domestik atau asing terjadi pada masa-masa genting krisis, hingga memunculkan *moral hazard dan bank runs*. Peran *lender of last resort* dalam memberikan bantuan memiliki kerangka kerja yang dapat dijamin keberhasilannya. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman, bukan hibah, yang harus dibayar beserta bunganya sebagai dukungan finansial disebut *bailout*. Pinjaman penyelamatan dan restrukturisasi utang yang diberikan oleh IMF, bertujuan agar negara mempunyai waktu mengubah kebijakan untuk membenahi finansial dan perekonomian yang *collapse*.<sup>29</sup>

#### 1.4.1. Teori dan Efektifitas Bailout

Dalam model teoritis tertentu, menurut Roubini, *bailout* dapat menyelesaikan kegagalan koordinasi dari pelarian uang yang diakibatkan oleh krisis finansial. Kehadiran yang *lender of last resort* menjamin tersedianya likuiditas untuk menghentikan larinya uang mencegah ekuilibrium yang buruk. Jika kreditur mengetahui tidak adanya keterlibatan *lender of last resort*, investor akan menghentikan insentif untuk melakukan penarikan investasi. Investasi tetap bertahan dalam negara dan mencegah terjadinya *bank runs*. *Bailout* dapat berjalan

<sup>28</sup> Roubini, N. & Setser, B.,2004,*Bailouts Or Bail-ins:Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C , hal.78

<sup>29</sup> Perubahan kebijakan domestik ditentukan sesuai perjanjian Struktural Adjustment Programme dengan IMF. Roubini, N. & Setser, B.,2004,*Bailouts Or Bail-ins:Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C , hal. 15-17

jika krisis merupakan kombinasi dari likuiditas dan secara fundamental lemah tetapi tidak pada ekonomi makro yang lemah.<sup>30</sup>

Dalam menerima *bailout* harus memenuhi kriteria salah satunya adalah kontribusi menjadi anggota IMF. Dengan keanggotaan ini memudahkan IMF untuk menentukan kuota dana yang dipinjamkan. Yang kedua adalah tingkat krisis finansial yang dialami negara dapat memberikan efek *contagion* dalam sistem finansial internasional. Dan yang terakhir adalah adanya andil keputusan dalam G-7 dalam hal ini berperan sebagai kreditor dengan kontribusi terbanyak dalam pendanaan IMF.<sup>31</sup> IMF yang berperan sebagai *lender of last resort* melakukan perundingan dengan perwakilan negara yang mengalami krisis untuk menentukan program yang diimplementasikan.

Dalam analisis perhitungan *bailout* yang dilakukan Jun Il Kim dalam peran IMF sebagai institusi yang memberikan bantuan untuk mengurangi peningkatan distorsi dari kegagalan koordinasi pasar yang diakibatkan oleh krisis finansial yang terjadi pada suatu negara, menyimpulkan bahwa *bailout* dapat mengurangi efek buruk dari krisis. Jika dana *bailout* yang diberikan sesuai dengan tingkat yang adil maka akan mengurangi resiko *moral hazard*. Kemungkinan *bailout* dapat membantu mengurangi biaya pinjaman dan meningkatkan selisih suku bunga antara pinjaman jangka panjang dan jangka pendek negara yang sedang berkembang pada umumnya. *Bailout* dalam skala besar dan termasuk dalam pengecualian tidak efektif dalam penyelesaian krisis jika negara debitur memiliki fundamental ekonomi yang relatif lemah dan tingkat utangnya tinggi.

---

<sup>30</sup> Roubini, N. & Setser, B.,2004,*Bailouts Or Bail-ins:Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C , hal.110

<sup>31</sup> G-7 adalah USA,Jepang, Jerman, UK, Perancis, Canada, dan Italia

Jika menggunakan akses pengecualian, *bailout* mungkin berjalan jika kelayakan instrumen dibatasi hanya pada negara dengan memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat dan utang yang *sustainable*.<sup>32</sup>

Menurut Roubini keberhasilan pemberian *bailout*, dapat diukur menggunakan indikator kenaikan ekonomi makro domestik secara keseluruhan. Kemampuan negara dalam memperbaiki kebijakan fiskalnya mempengaruhi berkurangnya tingkat defisit hingga menjadi surplus. Kemampuan menjalankan kebijakan penyesuaian struktural yang juga dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan fiskal dan moneter pengembalian pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas finansial domestik. Hal ini berdampak pada kembalinya kepercayaan pasar finansial yang mengairahkan kembali investasi dan permodalan pemerintah untuk mengurangi utang pada level yang *sustainable*.<sup>33</sup> Implikasi lebih jauh dapat dilihat dari tidak terjadinya *bank runs* dan efek *contagion* dalam kawasan. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran dana *bailout* beserta bunganya juga menjadi prioritas dalam keberhasilan *bailout* yang diberikan.<sup>34</sup>

IMF mempunyai beberapa fasilitas yang digunakan untuk mendukung program *bailout*, khususnya pada negara yang tergolong *emerging economies*, yang dikenal dengan *Stand By Arrangement* (SBA) dan fasilitas yang digunakan untuk penyediaan bantuan finansial yang cukup besar untuk waktu yang relatif pendek dalam arus modal yang dikenal dengan *Supplemental Reserve Facility* (SRF). SBA dan SRF memiliki jangka waktu pembayaran dan target berbeda yang

---

<sup>32</sup> Kim, J.,2007, *Unconditional IMF Financial Support and Investor Moral Hazard*, IMF working paper, hal.17

<sup>33</sup> Kembalinya kepercayaan dalam pasar finansial dapat dilihat dari peringkat kredit

<sup>34</sup> Roubini, N. & Setser, B.,2004,*Bailouts Or Bail-ins:Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C , hal.82

harus dicapai negara debitur dalam *bailout*. Besarnya *bailout* yang diberikan berdasarkan kuota kontribusi negara dalam IMF, tetapi ada pengecualian yang diberikan jika ternyata efek yang ditimbulkan dari krisis lebih parah.<sup>35</sup> Seiring dengan peningkatan peran IMF dalam penanganan krisis yang tidak hanya mencakup pada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tetapi juga kondisi struktural dengan program reformasi yang cenderung berbasis ke arah pasar.<sup>36</sup>

#### 1.4.2. Uni Eropa dan IMF dalam Perpektif Institusionalisme

##### Neoliberal

Robert Keohane mengeluarkan asumsi tentang tindakan negara yang dipengaruhi oleh kelembagaan institusi yang disebutnya institusionalisme neoliberal.<sup>37</sup> Hal ini diperkuat oleh Ernst Haas dengan konsep *spill over* dalam memperluas pengaruh institusi.<sup>38</sup> Stein berpendapat bahwa dengan adanya institusi yang semakin berkembang akan membentuk pemerintahan supranasional dan memperbesar peran institusi dalam politik internasional. Semakin kompleksnya masalah dan tantangan yang dihadapi negara menjadikan peran dan fungsi institusi semakin berkembang yang menghasilkan pemerintahan multilevel dimana negara menjadi nakhodanya.<sup>39</sup> Perkembangan pada institusi terlihat jelas

<sup>35</sup> Dana *bailout* normal yang diperoleh negara sebesar 100% dari kuota ke IMF dalam setahun sampai batas 300% dari kuota selama 3 tahun.

<sup>36</sup>Perbaikan ekonomi negara hanya dapat berjalan jika ada perbaikan fiskal dan moneter, maka dari itu perubahan kebijakan pemerintah diikuti sertakan dalam paket bailout yang disebut Sturtural Adjustment Program (SAP).Binhadi & Firmansyah, 2007,*Stabilitas Keuangan Internasional* dalam buku *IMF dan Stabilitas Keuangan Internasional*, Gramedia, Jakarta hal. 5

<sup>37</sup> Kusumawardhana, I.,2013, *European Union in Crisis :Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Uni Eropa*, Jurnal Hubungan Internasional:Volume VI , No. 1, hal.5

<sup>38</sup> Archarya,A. dan Johnston, A.I.,2007,*Comparing regional institutions:an introduction dalam Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*.Cambridge University Press. Hal 3 [online] diakses tanggal 2 Nov 2014 tersedia dalam: langtoninfo.co.uk

<sup>39</sup> Stein, A.,*Chapter 11: Neoliberalisme Institutionalism*,Hal 215-217,[online] diakses tanggal 3 Nov 2014 tersedia dalam: www.grandstrategy.net/Publications/Articles/.../11-Smit-Snidal-c11.pdf

dengan bergabungnya IMF dan Uni Eropa dalam menangani krisis finansial Yunani.

Banyak *scholar* yang berpendapat bahwa kebijakan IMF merupakan aksi responsif antara tekanan politik dan ekonomi, bukan keputusan teknokrat. Dalam pandangan umum, anggota institusi/organisasi internasional menyerahkan kekuasaan mereka pada birokrasi. Birokrasi mempunyai *agenda-setting* sendiri yang mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan bersifat independen sebelum disetujui oleh pimpinan institusi/organisasi internasional. Yang kedua birokrasi berisikan orang-orang yang kompeten dibidangnya dan adanya tekanan lobi-lobi politik juga dapat mempengaruhi kebijakan institusi/organisasi internasional. Barnett and Finnemore menelaah hubungan antara *interest* dan *preferences* dapat mempengaruhi institusi/organisasi internasional. Kleine menerjemahkan perilaku institusi/organisasi internasional, yang tercermin dalam pada norma informal dan “rule of the game” sebagai pembentuk struktur dan menuntun perilaku institusi/organisasi dalam dunia politik. Dalam pandangan ini juga negara yang lemah dapat dipengaruhi oleh negara yang kuat secara informal dan sebagai balasannya negara yang lemah diperbolehkan memberi banyak masukan secara formal, hal ini yang terjadi pada Uni Eropa.<sup>40</sup>

Dalam pandangan institusionalisme neoliberal, institusi/organisasi internasional menekankan pada pentingnya peran negara dan kepentingan nasional mereka dalam mempengaruhi kebijakan institusi/organisasi internasional. institusi/organisasi internasional merupakan *intergovernmental actor* yang berkooperasi untuk berbagi *national interest*. Prinsip intergovernmentalisme adalah

---

<sup>40</sup> Breen, M., 2013, *The Politics of IMF Lending*, Palgrave Macmillan, England, hal.13

pengambilan keputusan merupakan hasil konsensus dan bergantung pada *power* negara yang merupakan fungsi dari birokrasi dalam institusi/organisasi internasional.<sup>41</sup> Pollack menambahkan bahwa gambaran yang cocok untuk proses pengambilan kebijakan dalam Uni Eropa adalah model perundingan intergovernmental. Kepentingan negara-negara anggota tetap tersalurkan tetapi kepentingan bersama yang sesuai dengan fungsi Uni Eropa menentukan arah kebijakan.<sup>42</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa berkembang dalam kerangka kerja untuk meningkatkan kooperasi dari Perjanjian Maastricht yang mengikat integrasi dari negara-negara anggota sampai pengaturan implementasi kebijakan yang tertulis dalam Perjanjian Lisbon. Dalam perkembangannya European Commission berperan lebih efisien dan mempunyai agenda yang ambisius dalam efektifitas dana bantuan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan.<sup>43</sup> Kooperasi *bailout* antara Uni Eropa dan IMF merupakan dampak dari negosiasi kepentingan G7. Yunani menerima *bailout* dengan jumlah yang besar merupakan dukungan multilateral antara Uni Eropa dan IMF dan tidak ada konflik distribusi, walaupun adanya heterogenitas substansial dalam piutang G5 pada Yunani. menurut Doyle *bailout* IMF merupakan wujud dari kepentingan pemilik saham

---

<sup>41</sup> Breen, M.,2013,*The Politics of IMF Lending*, Palgrave Macmillan, England, hal.161

<sup>42</sup> Pollack, M.,2010,*Policy-making in the European Union*,Oxford Unversity Press,hal.20

<sup>43</sup> Carbone,2013,*Preserving Policy Autonomy: EU Development Cooperation rom Maastricht to Lisbon*,dalam buku *The EU's Lisbon Treaty: Institutional Choices and Implementation*, Ashgate Pubs., hal 230,[book online] diakses tanggal 18 Des 2014, tersedia dalam: <https://books.google.co.id>

yang tidak lain adalah G5 walaupun staff dan teknokrat IMF banyak yang tidak setuju dalam penanganan krisis utang pemerintah Eropa.<sup>44</sup>

Dalam penanganan krisis finansial, peran *lender of last resort* adalah memberikan dana bantuan bagi negara untuk menyembuhkan kembali sektor finansialnya. *Bailout* adalah bentuk bantuan dana tersebut dan dapat berjalan efektif jika dijalankan sesuai dengan ketentuan dan syarat kondisi ekonomi suatu negara. Krisis Finansial Yunani yang mempunyai ciri khas membutuhkan penanganan khusus antara Uni Eropa sebagai institusi yang mengatur moneter Euro dan IMF yang berperan sebagai *lender of last resort*. Kooperasi *bailout* yang dilakukan Uni Eropa dengan IMF merupakan bagian dari kebijakan penanganan krisis finansial Yunani. Kebijakan *bailout* tersebut menjadi tidak efektif dalam menangani finansial Yunani karena tingginya kepentingan stabilitas kawasan Uni Eropa.

### 1.5. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan, penulis menarik hipotesis sebagai berikut: Kegagalan kebijakan *bailout* pertama oleh Uni Eropa dan IMF dalam mengatasi krisis finansial Yunani dikarenakan tingginya kepentingan finansial Uni Eropa menjaga stabilitas finansial kawasan daripada kepentingan finansial Yunani. Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas *bailout* dalam mengatasi krisis finansial Yunani.

---

<sup>44</sup> G5 adalah Jerman, Perancis, UK, Italia, USA. Breen, M., 2013, *The Politics of IMF Lending*, Palgrave Macmillan, England, hal. 120-122

## 1.6. Metodologi Penelitian

### 1.6.1. Konseptual dan Operasional

#### 1.6.1.1. Efektifitas Bailout

Meyer menjelaskan Institusi/organisasi internasional sebagai intergovernmental aktor, dimana kooperasi atas berbagai kepentingan dari pemerintahan nasional, perluasan kekuasaan negara dan peran fungsional dari internasional birokrasi. Kebijakan yang dikeluarkan organisasi/institusi internasional merupakan hasil dari berbagai kepentingan negara yang sesuai dengan fungsional dari organisasi/institusi itu sendiri.<sup>45</sup> Kebijakan Uni Eropa dan IMF dalam menangani krisis finansial Yunani adalah kebijakan *bailout*. Efektifitas dari *bailout* dapat dilihat dari program yang ada dalam *bailout*, program penyesuaian struktural tersebut dan ukuran penguatan ekonomi makro.<sup>46</sup> Makro ekonomi juga menjadi patokan dalam mengukur stabilitas negara anggota zona Euro.<sup>47</sup>

Keberhasilan pemberian *bailout*, dapat diukur menggunakan indikator kenaikan ekonomi makro domestik secara keseluruhan. Kemampuan negara dalam memperbaiki kebijakan fiskalnya mempengaruhi berkurangnya tingkat defisit hingga menjadi surplus. Kemampuan menjalankan kebijakan penyesuaian struktural yang juga dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan fiskal dan moneter pengembalian pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas finansial domestik. Hal ini berdampak pada kembalinya kepercayaan pasar finansial yang

<sup>45</sup> Reinalda, B.& Verbeek, B.,2004,*Decision Making Within International Organisations*, Routledge,New York, hal.19

<sup>46</sup> IMF,2013,*Greece:Ex Post Evaluation Of Exceptional Access Under The 2010 Stand-By Arrangement*, [online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia di: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>

<sup>47</sup> European Union,*European Stability Mecanism*,[online] diakses tanggal 18 des 2014, tersedia dalam:<http://www.esm.Europa.eu/>

mengairahkan kembali investasi dan permodalan pemerintah untuk mengurangi utang pada level yang *sustainable*.<sup>48</sup> Konsep ini dioperasikan dalam dua indikator yaitu indikator internal dan eksternal. Indikator internal terdapat dua ukuran yang pertama yaitu kebijakan *bailout* yang diberikan mulai dari perundingan dan ukuran *bailout* yang diberikan.<sup>49</sup> Ukuran indikator yang kedua ekonomi makro Yunani yang terdiri dari tingkat PDB, tingkat inflasi, tingkat utang, tingkat defisit, dan jumlah pengangguran yang berpengaruh kondisi sosial dan politik.<sup>50</sup> Sedangkan Indikator eksternal dari efektifitas *bailout* adalah kelancaran pembayaran utang dan tercegahnya efek buruk krisis yaitu efek *contagion*, *moral hazard*, dan *bank runs*.<sup>51</sup>

### 1.6.1.2. Stabilitas Finansial Kawasan

Stabilitas finansial sangat penting diperlukan dalam masa globalisasi ini dimana finansial negara saling terintegrasi dalam pasar Finansial internasional. Kebutuhan stabilitas finansial masing-masing negara sangat tinggi untuk mendapatkan stabilitas dalam sistem internasional. Stabilitas keuangan internasional sangat penting artinya karena dalam sistem keuangan internasional yang stabil, lembaga-lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien ke dalam kegiatan produktif, memprediksi sekaligus mengukur resiko finansial, dan ketahanan dalam menghadapi guncangan. Stabilitas keuangan secara luas dapat

<sup>48</sup> Kembali kepercayaan dalam pasar finansial dapat dilihat dari peringkat kredit

<sup>49</sup> Roubini, N. & Setser, B., 2004, *Bailouts Or Bail-ins: Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C , hal.82-95

<sup>50</sup> European Commission, *Economic and Financial Affairs: Stability And Growth Pact*, diakses tanggal 19 November 2014, tersedia dalam: [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm)

<sup>51</sup> Roubini, N. & Setser, B., 2004, *Bailouts Or Bail-ins: Responding To Financial Crises in Emerging Economies*, The Institute For International Economics, Washington D.C , hal.123-130

diartikan sebagai menghindari terjadinya kegagalan lembaga keuangan dalam skala besar dan menghindari gangguan serius terhadap fungsi intermediasi dari sistem keuangan. Ishi dan Hebermeir menjelaskan bahwa dalam sistem finansial yang stabil terdapat kepercayaan yang tinggi dimana lembaga-lembaga keuangan dalam sistem dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa gangguan dari luar.<sup>52</sup>

Disamping itu pelaku pasar dapat melakukan transaksi pada tingkat harga yang relatif stabil dan transaksi yang dilakukan mencerminkan kondisi fundamental. dengan demikian stabilitas keuangan menekankan stabilnya dua komponen penting yaitu institusi dan pasar yang membentuk sistem keuangan. Sutton dan Tosovsky (2005) mendefinisikan kestabilan keuangan meliputi efisiensi dan ketahanan sistem keuangan yang kompleks dan tidak hanya bergantung pada institusi keuangan secara individu melainkan juga bergantung pada interaksi antara lembaga keuangan, sektor riil dan pasar finansial.<sup>53</sup> Stabilitas finansial Uni Eropa tercantum dalam Stability Growth Pact yang diatur oleh European Community dan European Central Bank. Uni Eropa sejak awal dibentuk berdasarkan landasan ekonomi maka stabilitas finansial kawasan menjadi salah pilar utama institusi. Konsep ini dioperasionalkan dalam dua indikator, yang pertama stabilitas ekonomi makro negara anggota Uni Eropa, stabilitas nilai tukar Euro, dan peringkat utang yang diberikan oleh lembaga peringkat obligasi

---

<sup>52</sup> Caprio, G. & Bacchetta, P. 2013. *Handbook of Safeguarding Global Financial Stability: Political, Social, Cultural, And Economic Theories And Model*, Elsevier Pub., London hal. 67

<sup>53</sup> Binhadi & Firmansyah, 2007, *Stabilitas Keuangan Internasional* dalam buku *IMF dan stabilitas Keuangan Internasional*: Gramedia, Jakarta hal. 10-13

(Standart & Poor/Moody's/Fitch). Indikator yang kedua adalah keberlangsungan integrasi negara anggota kawasan dalam Uni Eropa.<sup>54</sup>

### 1.6.2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena penelitian ini menganalisis penyebab kegagalan *bailout* pertama oleh Uni Eropa dan IMF untuk menangani krisis finansial Yunani tahun 2010 sampai dengan 2012. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.<sup>55</sup> Variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini yaitu, kegagalan kebijakan *bailout* oleh Uni Eropa dan IMF sebagai variabel dependen dan kepentingan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas kawasan sebagai variabel independen bukan mengatasi krisis finansial Yunani.

### 1.6.3. Jangkauan Penelitian

Penulis menggunakan jangkauan penelitian antara tahun 2010 hingga awal 2012. Dimana tahun 2010 merupakan awal Yunani mengajukan bantuan *bailout* yang disahkan oleh Uni Eropa pada bulan Mei 2010. *Bailout* yang pertama berlangsung hingga berakhir pada bulan Maret 2012 dengan pengesahan *bailout* yang kedua. *Bailout* kedua diberikan karena perekonomian dan keadaan domestik Yunani semakin terpuruk dan terancam gagal bayar kembali untuk pembayaran utang yang jatuh tempo pada pertengahan 2012, sehingga membutuhkan program penanganan baru dari Uni Eropa dan Yunani. Untuk mengetahui data sejarah dan

<sup>54</sup> European Commission, *Economic and Financial Affairs: Stability And Growth Pact*, diakses tanggal 19 November 2014, tersedia dalam: [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm)

<sup>55</sup> Silalahi, U., 2006, *Metode Penelitian*, Unpar Press, Bandung, hlm. 28.

implikasi dari kebijakan penulis memakai data setelah maupun sebelum kebijakan *bailout*.

#### 1.6.4. Tipe Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi seperti surat kabar, buku, majalah, jurnal, koran, publikasi pemerintah, arsip organisasi, media elektronik, media online (internet) seperti website dan database resmi pemerintah, serta referensi-referensi lainnya.<sup>56</sup> Setelah itu, data-data yang telah diperoleh tersebut diseleksi, diolah, dan dilampirkan sesuai kebutuhan untuk memudahkan analisa penelitian.

#### 1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif melalui analisa secara mendalam (*in-depth analysis*) terhadap data sekunder hasil dari studi pustaka. Tujuan dari teknik analisa ini bukan suatu generalisasi semata tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, yang berfungsi untuk memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.<sup>57</sup> Penggunaan teknik analisis ini juga dikarenakan oleh data yang digunakan oleh penulis bukanlah merupakan data yang sifatnya murni numerik (berisi angka-angka) semata, melainkan berupa kata-kata yang tidak dapat disusun dalam kategori-kategori statistik. Kata-kata tersebut diperoleh dari tiga proses analisis yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

<sup>56</sup>Matthew, M. & Huberman A., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm.15-18

<sup>57</sup> Ibid

penarikan kesimpulan, dengan interpretasi data yang dilakukan hanya terbatas pada data-data yang tersedia dalam penelitian saja.<sup>58</sup>

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian mengenai kegagalan *bailout* yang diberikan Uni Eropa ditulis secara sistematis ke dalam lima bab yaitu bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan beserta kerangka pemikiran dan metodologi penelitian. Bab kedua menjelaskan tentang kebijakan *bailout* pertama Uni Eropa dan IMF dan analisis perekonomian Yunani setelah menerima *bailout* pertama. Bab ketiga berisi analisis stabilitas finansial Uni Eropa pada saat implementasi kebijakan *bailout* pertama Yunani tahun 2010-2012. Bab keempat berisi tentang analisis kepentingan Uni Eropa dalam *bailout* pertama Yunani dan bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian.

---

<sup>58</sup> Ibid